



**Laporan Bulanan Sekretariat Utama
Bulan Januari
2025**

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu penting karena bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga pemerintah mengimplementasikan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Aplikasi SAKIP ini digunakan untuk mengobservasi dan menilai kinerja suatu instansi pemerintah. Badan Pangan Nasional menggunakan aplikasi SAKIP sebagai bentuk komitmen Badan Pangan Nasional kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang dipergunakan. Sekretariat Utama yang bertugas mendukung manajemen Badan Pangan Nasional wajib mengisi aplikasi SAKIP. Pengisian aplikasi SAKIP ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan aktualisasi program atau kegiatan di Sekretariat Utama di sepanjang tahun 2025. Tahap berikutnya menyusun Laporan Bulanan Sekretariat Utama yang berisi aktualisasi dari aktivitas, program dan kegiatan yang terjadi di Badan Pangan Nasional. Laporan ini disusun secara bulanan sehingga pelaporan kegiatan atau program yang sudah berlangsung di bulan itu. Selain itu, bahan dan data yang dipakai pada aplikasi SAKIP ini menggunakan instrumen penilaian yang berpatokan dengan implementasi dan realisasi kegiatan atau program yang dilaksanakan. Hasil dari dokumen ini dapat digunakan sebagai referensi untuk laporan bulan berikutnya. Sekretariat utama mendapatkan alokasi berdasarkan aturan alokasi dalam BA 125 milik Badan Pangan Nasional dan uraian alokasi untuk Program Dukungan Manajemen serta diprioritaskan untuk pembayaran honor dan operasional kantor. Pemantauan atas penggunaan alokasi yang aturan dalam bulan Januari tahun 2025 harus tetap terlaksana agar efisien dan efektif. Kami berharap laporan ini bisa berguna untuk seluruh pihak dan sebagai referensi buat pemugaran aplikasi aktivitas kedepan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran sangat kami harapkan pada rangka menyajikan laporan.

Jakarta, Februari 2025



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Metodologi Penyusunan Laporan	4
BAB II: RENCANA KINERJA OUTPUT	5
BAB III: PELAKSANAAN KEGIATAN	8
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	9
3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas	11
BAB IV: PENUTUP	12
4.1 Kesimpulan	21
4.2 Permasalahan	21
4.3 Rekomendasi	21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Januari 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-1

Tanggal 21 Februari 2025 6

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Januari Tahun 2025 Per Output dan

Komponen Lingkup Sekretariat Utama 9

Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Januari Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan

Pangan Nasional 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 1 – 21 Februari 2025	22
Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan Januari 2025	23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan untuk masyarakat. Hal ini tergambar dari Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 yang menyatakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan yang dipercaya masyarakat perlu mengatur akan kebijakan terhadap pangan. Pemerintah mengatur tentang kebijakan pangan dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 dijelaskan tentang tugas, susunan badan, dan tata kelola dari Badan Pangan Nasional.

Fungsi yang diutamakan untuk Badan Pangan Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Oleh sebab itu, Badan Pangan Nasional berfokus untuk mengatur kebijakan di bidang pangan. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan BUMN di bidang pangan dalam mengerjakan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah, Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sistem pangan nasional yang transparan, akuntabel, loyal dan berkelanjutan serta berkoordinasi dengan instansi-instansi lain baik itu kementerian-kementerian lain maupun universitas-universitas untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagaimana visi Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022.

Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1 Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 2 Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi;
- 3 Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- 4 Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional.

Sekretariat Utama

Laporan bulanan dibuat Badan Pangan Nasional secara periodik sebagai bentuk implementasi instansi negara yang bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai salah satu instrumen dalam pemantauan, jejak program atau kegiatan yang telah terlaksana dan evaluasi yang menggambarkan pencapaian dan bentuk realisasi terhadap target kinerja organisasi dalam periode bulanan. Pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan pencapaian target dapat berjalan sesuai yang ditetapkan, mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mengidentifikasi permasalahan yang akan timbul di periode mendatang.

Hasil atas peninjauan dan evaluasi serta bentuk pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan pendayagunaan anggaran kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Januari 2025

dituangkan dalam bentuk laporan peninjauan dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat Utama bulan Januari 2025. Laporan ini sebagai catatan dokumentasi realisasi fisik dan keuangan selama bulan Januari 2025 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output lingkup Sekretariat Utama tahun 2025 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan dan merepresentasikan program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkup Sekretariat Utama di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Sekretariat Utama pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Sekretariat Utama periode bulan Januari 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target periode bulan Januari 2025.

1.3 Metodologi Penyusunan Laporan

Metodologi penyusunan laporan meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) dari Unit Kerja Eselon (UKE) 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II
RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja pada Sekretariat Utama selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan Januari 2025 akan dilihat dari dukungan pencapaian Rincian Output (RO) dan komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA Revisi ke-1 pada bulan Januari 2025. Pada dokumen tersebut pada bulan Januari ditargetkan sebesar 4,94% Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Target Fisik dan Keuangan Bulan Januari 2025 Sesuai DIPA Revisi ke-1

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Alokasi Tahun 2025		Target Januari th. 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan 4,94% (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen		104,202,471,000	-	5.147.602.067	-
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional					
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	719,596,000		35.548.042	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	306,121,000		15.122.377	
	Layanan Hukum	686,492,000		33.912.705	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,276,175,000		112.443.045	
	Layanan Protokoler	459,390,000		22.693.866	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,193,087,000		58.938.498	
	Layanan Umum	5,212,918,000		257.518.149	
	Layanan Perkantoran	78,245,925,000		3.865.348.695	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	2,313,304,000		114.277.218	

.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	1,554,636,000		76.799.018	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,049,427,000		200.041.694	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	538,600,000		26.606.840	
	Layanan Manajemen Keuangan	1,093,872,000		54.037.277	
	Layanan Audit Internal	1,827,594,000		90.283.144	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000		13.376.285	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000		159.688.464	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	221,999,000		10.966.751	

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 53 output/RO dengan pagu anggaran sebesar **Rp.191,980,227,000,-** untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Januari Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per belanja dan per kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional sebagaimana tabel 2 dan tabel 3 berikut:

Tabel 2. Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Januari Tahun 2025 Per Output dan Komponen Lingkup Sekretariat Utama

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen		Target (4,94 .1%)		Realisasi (SP2D)	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
WA-Program Dukungan Manajemen					
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional		5.147.602.067	-	2,077,669,160	-
AEC-Kerja sama	Kerja Sama Bidang Pangan	35.548.042		0	
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan BMN	15.122.377		25,000,000	
	Layanan Hukum	33.912.705		0	
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	112.443.045		0	
	Layanan Protokoler	22.693.866		0	
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	58.938.498		32,830,000	
	Layanan Umum	257.518.149		40,000,000	

	Layanan Perkantoran	3.865.348.695		0	
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	114.277.218		0	
.EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan Manajemen SDM	76.799.018		0	
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	200.041.694		0	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.606.840		0	
	Layanan Manajemen Keuangan	54.037.277		40,200,000	
	Layanan Audit Internal	90.283.144		24,050,000	
PAD-Peraturan Presiden	Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional	13.376.285		0	
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pangan	159.688.464		81,600,000	
UAB-Sistem Informasi Pemerintahan	Sistem Informasi Pangan dan Gizi	10.966.751		77,000,000	

Tabel 3. Realisasi Keuangan Bulan Januari Tahun 2025 Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

Program dan Kegiatan	Target 4,93% (Rp)	Realisasi SP2D (Rp)	% (Dari Target)
Badan Pangan Nasional	9,483,823,214	2,460,314,524	30.29%
HA-Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	4,336,221,146	382,645,364	10.31%
WA-Program Dukungan Manajemen	5,147,602,067	2,077,669,160	47.14%

Dari tabel 3 diatas, realisasi keuangan Program Dukungan Manajemen melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama Bulan Januari Tahun 2025 telah terealisasi sebesar **Rp. 2,077,669,160 (47.14%)** dari target sebesar **Rp. 5.147.602.067 (4.93%)**

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional, Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan Januari Tahun 2025 telah ter-realisis anggaran sebesar 2,460,314,524 dengan prioritas kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

Sekretaris Utama

1. 24 Januari 2025 - Lantik Pejabat dan Fungsional NFA



JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) pada Jumat (24/1/2025) melaksanakan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat fungsional yang dihadiri langsung oleh Kepala NFA Arief Prasetyo Adi. Di acara pengukuhan hari ini, Arief pun memberikan arahan dalam kaitannya menggerakkan NFA menjalankan fungsinya agar dapat semakin lebih progresif.

"Pada hari ini kita tentunya bersyukur karena kita melantik 2 direktur yang berkaitan dengan fungsi pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan," ujar Arief.

"Jadi saya sangat concern bahwa 2 direktorat ini dapat memberikan kontribusi yang kuat sebagai garda terdepan dalam mempersiapkan pencegahan kerawanan pangan melalui berbagai program aksi," lanjutnya.

Untuk diketahui, pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik hari ini antara lain Sri Nuryanti sebagai Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dan Nita Yulianis sebagai Direktur Kewaspadaan Pangan.

Selain itu, ada pula pejabat fungsional yakni Endar Purnawan sebagai Analis Kebijakan Ahli Madya dan Mukholikin sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama.

"Saya minta, kita semua fokus mengawal bagaimana Bulog bisa menyerap untuk mempersiapkan Cadangan Pangan Pemerintah. Beras 3 juta ton dan jagung 1 juta ton di tahun ini," Arief berpesan.

Sebagaimana diketahui, terkait upaya pemerintah dalam penyerapan produksi dalam negeri untuk memasok Cadangan Pangan Pemerintah, dilaksanakan melalui Perum Bulog. Realisasi pengadaan beras dalam negeri di 2024 telah dilaksanakan Bulog hingga mencapai 1,266 juta ton. Sementara untuk pengadaan jagung pakan dari petani domestik, Bulog telah menyerap hingga 84 ribu ton selama 2024 lalu.

"Ini karena Pak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa Indonesia tidak ada impor jagung. Tidak ada impor beras. Tidak ada impor gula untuk konsumsi dan juga untuk garam konsumsi, sehingga pada saat panen raya semester satu ini, kita harus lebih optimal dalam penyerapan panen petani dalam negeri," imbuhnya.

"Demikian juga dengan kewaspadaan dan kerawanan pangan juga. Tolong dikawal," sebutnya. Adapun capaian dari aspek kerawanan pangan telah dapat menekan jumlah daerah rentan rawan pangan di Indonesia.

Berdasarkan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) yang dikoordinasikan oleh NFA, memperlihatkan adanya penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan menurun dari 74 kabupaten/kota pada FSVA

tahun 2022 menjadi 62 kabupaten/kota pada FSVA 2024. Di samping itu, NFA menargetkan persentase penurunan sisa pangan dapat berkurang 3 sampai 5 persen mulai 2025 ini.

Berikutnya yang tak kalah penting adalah mengawal upaya penanganan limbah pangan di Indonesia. Sebagai langkah awal, NFA mendorong pengembangan kebijakan untuk mendorong penurunan tingkat limbah pangan melalui usulan draf rancangan Peraturan Presiden tentang penyelamatan susut dan sisa pangan (SSP).

Di penghujung 2024, NFA bersama Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) telah meluncurkan metode baku perhitungan SSP. Melalui penerapan metode ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam melakukan penaksiran dan pengukuran tingkat kehilangan pangan yang terjadi dalam proses bisnisnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan hari ini antara lain Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy; Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Hermawan; Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum Rachmad Firdaus; Inspektur NFA Imron Rosjidi; Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan NFA Kelik Budiana beserta jajaran pegawai NFA lainnya.

2. 30 Januari 2025 - Aturan Rafaksi HPP Gabah Dicabut Demi Melindungi Petani



JAKARTA – Tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan tampak dari kebijakan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dan meniadakan rafaksi harga gabah.

Kebijakan tersebut diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

"HPP GKP di petani Rp 6.500 per kg. Penyesuaian ini dengan tujuan untuk melindungi sedulur petani kita, sehingga tetap dan terus semangat berproduksi demi swasembada pangan," ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi se usai menghadiri 'Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani', pada Kamis (30/1/2025) di Jakarta.

Ditambahkan Arief, momentum panen raya tahun ini sangat penting untuk mengoptimalkan serapan gabah/beras dalam negeri. Oleh karena itu, sesuai

hasil Rakortas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pihaknya telah bersurat kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk melaksanakan penugasan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada tahun 2025 dengan target sebanyak 3 juta ton setara beras.

"Dengan target ini dan juga dengan kebijakan HPP gabah yang sudah disesuaikan dengan kepentingan petani, kita berharap serapan gabah petani dalam negeri dapat berjalan secara optimal. Tentunya dengan harapan bahwa proyeksi panen raya dari BPS dapat terealisasi dengan baik di lapangan," urai Arief.

Adapun berdasarkan amatan Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi panen pada Januari dan Februari masing-masing 1,31 juta ton beras dan 2,08 juta ton beras. Lalu pada Maret diperkirakan akan melonjak menjadi 5,20 juta ton beras.

Angka ini sudah melampaui konsumsi beras bulanan sebesar 2,5 juta ton atau mengalami surplus. Berdasarkan tren, diperkirakan produksi beras masih akan surplus seiring musim panen raya di April dan Mei.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan proyeksi produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

"Produksi Januari, Februari, Maret 2025 sesuai data BPS, itu naik dibanding tahun lalu, itu 50 persen di Januari, 49 persen di Februari dibanding tahun lalu di bulan yang sama, dan 51 persen di bulan Maret. Semoga di April juga baik." ungkapnyanya.

Sementara itu, sesuai penugasan dari NFA, target serap 3 juta ton setara beras akan dioptimalkan pada semester 1 tahun 2025, di mana pada periode tersebut panen raya berlangsung, dengan target sebanyak 2,1 juta ton setara beras atau 70 persen dari total target tahun 2025.

"Saya mengajak kita semua untuk mewujudkan target penyerapan gabah beras 3 juta ton secara hand in hand. Ini tentunya secara bersama demi mewujudkan swasembada pangan," ujar Arief.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menekankan agar Bulog turut pula memaksimalkan fasilitas Sentra Penggilingan Padi (SPP). Total ada 10 unit dengan sebaran di 5 provinsi yang termasuk penyumbang produksi padi nasional sebesar 58,4 persen pada 2024.

SPP sendiri merupakan unit sarana pengolahan gabah yang didukung oleh peralatan pengolahan dengan teknologi serta memiliki kapasitas produksi dan penyimpanan yang cukup besar. Sebaran SPP Bulog di Jawa Timur ada 4 unit yang terletak di Bojonegoro, Magetan, Jember, dan Banyuwangi. Jawa Timur sendiri pada 2024 memproduksi 9,2 juta ton padi berdasarkan data BPS.

Lalu SPP di Jawa Tengah ada di Sragen dan Kendal. Provinsi Jawa Tengah berhasil memproduksi padi 8,8 juta ton pada 2024. Sementara SPP di Jawa Barat ada di Subang dan Karawang. Raihan produksi padi di Jawa Barat sendiri sepanjang 2024 total 8,5 juta ton.

Terakhir, SPP Bulog ada 1 unit di masing-masing Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Produksi padi tahun 2024 di Lampung sebesar 2,7 juta ton dan NTB 1,4 juta ton. Melalui sebaran fasilitas SPP di 5 provinsi sentra produsen padi nasional tersebut, Bulog dapat menyerap gabah petani lokal dan diolah melalui SPP tersebut untuk menjadi beras yang berkualitas.

3. 31 Januari - NFA Perkuat Intervensi Pengendalian Inflasi Pangan bersama TPIP di Tahun 2025



Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) siap melaksanakan intervensi pengendalian inflasi pangan sepanjang tahun 2025 bersama kementerian/lembaga terkait. Hal ini disampaikan Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy usai menghadiri High Level Meeting TPIP di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (31/1/2025).

Sarwo mengatakan intervensi pengendalian inflasi pangan yang dilaksanakan NFA antara lain dilakukan melalui aksi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), penyaluran bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), optimalisasi Sarpras rantai dingin (cold chain), penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), gerakan Stop Boros Pangan, dan penganekaragaman konsumsi pangan.

"Upaya pengendalian harga yang kami lakukan bersama kementerian/lembaga terkait tingkat pusat dan daerah cukup efektif dalam mendorong ketersediaan pangan yang sempat terganggu akibat dampak perubahan iklim. Di tahun 2025 upaya semacam ini akan kami perkuat untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini," jelas Sarwo.

Diketahui program penyaluran bantuan pangan beras kepada 16 juta PBP dipastikan berlangsung pada bulan Februari khususnya di daerah-daerah yang belum melaksanakan panen raya. Kelancaran penyaluran bantuan pangan ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah di masa musim hujan Januari - Februari 2025 guna memastikan bantuan pangan diterima tepat waktu.

Adapun dalam menghadapi Ramadan dan Idulfitri tahun 2025 serta bergulirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), NFA terus menjaga kondisi ketersediaan pangan yang merata di sepanjang waktu dan di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini salah satunya dilakukan untuk mendukung program swasembada pangan yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Sekretariat Utama pada periode bulan Januari 2025 sebagai berikut:

1. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama adalah Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 104,202,471,000,- dari total pagu Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 191,980,227,000,- yang terdiri dari 6 Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 15 Rincian Output (RO).
2. Realisasi keuangan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional pada bulan Januari 2025 mencapai Rp. 2,077,669,160 (47,14%) dari target sebesar Rp. 5.147.602.067 (4,93%)

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di Sekretariat Utama adalah masih rendahnya realisasi anggaran pada beberapa MAK, bahkan ada yang masih 0 realisasinya pada awal tahun dikarenakan anggaran masih belum bisa digunakan pada saat awal tahun.

4.3 Rekomendasi

Tindak lanjut atas permasalahan di atas antara lain:

1. Penyelesaian dokumen pendukung sebagai syarat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi ABT Badan Pangan Nasional Tahun 2025.
2. Penyiapan SDM yang akan menangani pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk mendorong realisasi keuangan dapat mencapai target yang telah direncanakan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. DIPA Revisi 1 Tanggal 21 Februari 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 125.01.1.690590/2025



05.90714053-0000-7731

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (125) | BADAN PANGAN NASIONAL |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | BADAN PANGAN NASIONAL |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (690590) | BADAN PANGAN NASIONAL |
| Sebesar | : Rp. 275.718.455.000 | (DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN BELAS JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
04 EKONOMI
04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	275.718.455.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (130) Rp. | 275.718.455.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHASIL NAZARA
NIP. 197011231990031009

Lampiran 2. Realisasi Sekretariat Utama Bulan Januari 2025

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PANGAN NASIONAL PUSAT
Data s/d tanggal 31 Januari 2025

URAIAN	PAGU REVISI	PAGU BLOKIR	REALISASI SP2D	%	REALISASI AKRUAL	%	SISA ANGGARAN
JUMLAH SELURUHNYA	191,980,227,000	2,895,445,000	2,460,314,524	1.28%	9,949,242,553	5.18%	189,519,912,476
WA.6874 Program Dukungan Manajemen	104,202,471,000	320,680,000	2,077,669,160	1.99%	9,057,123,084	8.69%	102,124,801,840
WA.6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	104,202,471,000	320,680,000	2,077,669,160	1.99%	9,057,123,084	8.69%	102,124,801,840
AEC Kerja sama	719,596,000	0	0	0.00%	0	0.00%	719,596,000
AEC.001 Kerja Sama Bidang Pangan	719,596,000	0	0	0.00%	0	0.00%	719,596,000
101 Kerja Sama Bidang Pangan	719,596,000	0	0	0.00%	0	0.00%	719,596,000
101.0A Kerjasama di Bidang Pangan	719,596,000	0	0	0.00%	0	0.00%	719,596,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	88,380,108,000	97,830,000	1,704,847,547	1.93%	6,538,025,442	7.40%	86,675,260,453
EBA.956 Layanan BMN	306,121,000	25,000,000	0	0.00%	25,000,000	8.17%	306,121,000
101 Layanan BMN dan Pengadaan	306,121,000	25,000,000	0	0.00%	25,000,000	8.17%	306,121,000
101.0A Layanan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	145,430,000	10,000,000	0	0.00%	0	0.00%	145,430,000
101.0B Layanan Pengelolaan BMN	160,691,000	15,000,000	0	0.00%	25,000,000	15.56%	160,691,000
EBA.957 Layanan Hukum	686,492,000	0	8,300,000	1.21%	8,300,000	1.21%	678,192,000
101 Layanan Hukum	686,492,000	0	8,300,000	1.21%	8,300,000	1.21%	678,192,000
101.0A Layanan Hukum	351,350,000	0	8,300,000	2.36%	8,300,000	2.36%	343,050,000
101.0B Layanan Advokasi Hukum	181,542,000	0	0	0.00%	0	0.00%	181,542,000
101.0C Layanan Penguatan JDIH, IRH dan IKK	153,600,000	0	0	0.00%	0	0.00%	153,600,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2,276,175,000	0	0	0.00%	53,474,562	2.35%	2,276,175,000
101 Layanan Hubungan Masyarakat	2,276,175,000	0	0	0.00%	53,474,562	2.35%	2,276,175,000
101.0A Layanan Humas dan Informasi Publik	2,276,175,000	0	0	0.00%	53,474,562	2.35%	2,276,175,000
EBA.959 Layanan Protokoler	459,390,000	0	0	0.00%	0	0.00%	459,390,000
101 Layanan Protokoler	459,390,000	0	0	0.00%	0	0.00%	459,390,000
101.0A Layanan Keprotokoleran	459,390,000	0	0	0.00%	0	0.00%	459,390,000
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,193,087,000	32,830,000	12,000,000	1.01%	12,000,000	1.01%	1,181,087,000
101 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,193,087,000	32,830,000	12,000,000	1.01%	12,000,000	1.01%	1,181,087,000
101.0A Layanan Manajemen Organisasi dan Tatalaksana	430,797,000	0	0	0.00%	0	0.00%	430,797,000
101.0B Layanan Reformasi Birokrasi	188,150,000	0	12,000,000	6.38%	12,000,000	6.38%	176,150,000
101.0C Pengembangan Jabatan Fungsional	574,140,000	32,830,000	0	0.00%	0	0.00%	574,140,000
EBA.962 Layanan Umum	5,212,918,000	40,000,000	61,079,200	1.17%	400,779,200	7.69%	5,151,838,800
101 Layanan Umum	5,212,918,000	40,000,000	61,079,200	1.17%	400,779,200	7.69%	5,151,838,800
101.0A Layanan Rumah Tangga Pimpinan	3,505,907,000	0	61,079,200	1.74%	360,779,200	10.29%	3,444,827,800
101.0B Layanan Dukungan Kesekretariatan	739,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	739,000,000
101.0C Layanan Tata Usaha Biro	276,670,000	0	0	0.00%	0	0.00%	276,670,000
101.0D Layanan Tata Usaha Pimpinan	322,101,000	20,000,000	0	0.00%	40,000,000	12.42%	322,101,000
101.0E Layanan Perserutan dan Kearsipan	369,240,000	20,000,000	0	0.00%	0	0.00%	369,240,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	78,245,925,000	0	1,623,468,347	2.07%	6,038,471,680	7.72%	76,622,456,653
001 Gaji dan Tunjangan	62,254,305,000	0	1,604,118,347	2.58%	3,201,109,680	5.14%	60,650,186,653
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	62,254,305,000	0	1,604,118,347	2.58%	3,201,109,680	5.14%	60,650,186,653
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	15,991,620,000	0	19,350,000	0.12%	2,837,362,000	17.74%	15,972,270,000
002.0A Administrasi Kegiatan	1,121,860,000	0	19,350,000	1.72%	133,350,000	11.89%	1,102,510,000
002.0B Terpeliharanya Kendaraan	2,248,257,000	0	0	0.00%	0	0.00%	2,248,257,000
002.0C Terbayarnya Layanan Telepon dan Listrik	906,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	906,000,000
002.0D Tenaga Teknis Lainnya	5,699,215,000	0	0	0.00%	2,146,052,000	37.66%	5,699,215,000
002.0E Penyediaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,951,538,000	0	0	0.00%	557,960,000	9.38%	5,951,538,000
002.0F Pelantikan Jabatan	64,750,000	0	0	0.00%	0	0.00%	64,750,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2,313,304,000	0	0	0.00%	0	0.00%	2,313,304,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	2,313,304,000	0	0	0.00%	0	0.00%	2,313,304,000
101 Layanan Sarana Internal	2,313,304,000	0	0	0.00%	0	0.00%	2,313,304,000
101.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,346,500,000	0	0	0.00%	0	0.00%	1,346,500,000
101.0B Pengadaan Kendaraan Roda 4	966,804,000	0	0	0.00%	0	0.00%	966,804,000
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	1,554,636,000	0	0	0.00%	0	0.00%	1,554,636,000
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1,554,636,000	0	0	0.00%	0	0.00%	1,554,636,000
101 Layanan Manajemen SDM Internal	1,554,636,000	0	0	0.00%	0	0.00%	1,554,636,000
101.0A Layanan Manajemen SDM	716,996,000	0	0	0.00%	0	0.00%	716,996,000
101.0B Layanan Pendidikan dan Pelatihan	499,210,000	0	0	0.00%	0	0.00%	499,210,000
101.0C Layanan Administrasi dan Manajemen Pegawai Organisasi, Suwita dan Hukum	338,430,000	0	0	0.00%	0	0.00%	338,430,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,509,493,000	64,250,000	366,561,864	4.88%	442,582,406	5.89%	7,142,931,136
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,049,427,000	0	0	0.00%	57,141,275	1.41%	4,049,427,000
101 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,049,427,000	0	0	0.00%	57,141,275	1.41%	4,049,427,000
101.0A Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4,049,427,000	0	0	0.00%	57,141,275	1.41%	4,049,427,000
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	538,600,000	0	0	0.00%	18,879,267	3.51%	538,600,000
101 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	538,600,000	0	0	0.00%	18,879,267	3.51%	538,600,000
101.0A Layanan Pemantauan dan Evaluasi	538,600,000	0	0	0.00%	18,879,267	3.51%	538,600,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,093,872,000	40,200,000	262,052,900	23.96%	262,052,900	23.96%	831,819,100
101 Layanan Manajemen Keuangan	1,093,872,000	40,200,000	262,052,900	23.96%	262,052,900	23.96%	831,819,100
101.0A Layanan Perbendaharaan	379,426,000	0	98,052,900	25.84%	98,052,900	25.84%	281,373,100
101.0B Layanan Akuntansi dan Verifikasi	383,850,000	0	70,000,000	18.24%	70,000,000	18.24%	313,850,000
101.0C Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	182,734,000	0	30,000,000	16.42%	30,000,000	16.42%	152,734,000
101.0D Layanan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	147,862,000	40,200,000	64,000,000	43.28%	64,000,000	43.28%	83,862,000
EBD.965 Layanan Audit Internal	1,827,594,000	24,050,000	104,508,964	5.72%	104,508,964	5.72%	1,723,085,036
101 Layanan Audit Internal	1,827,594,000	24,050,000	104,508,964	5.72%	104,508,964	5.72%	1,723,085,036
101.0A Layanan Internal	406,834,000	20,000,000	0	0.00%	0	0.00%	406,834,000
101.0B Audit pada Satker lingkup Badan Pangan Nasional	560,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	560,000,000
101.0C Reviu kegiatan mandatory dan kegiatan strategis pada satker lingkup Badan Pangan Nasional	220,000,000	0	93,963,864	42.71%	93,963,864	42.71%	126,036,136
101.0D Tindak lanjut Hasil Pengawasan Internal/ External	152,000,000	0	10,545,100	6.94%	10,545,100	6.94%	141,454,900
101.0E Pemantauan atas penerapan SPIR pada unit kerja lingkup badan	67,460,000	0	0	0.00%	0	0.00%	67,460,000
101.0F Pemantauan dan evaluasi sistem manajemen APB/Pelaksanaan manoiri maturitas SPIP/Danilmanas Kualitas Manirasi SPIDP	120,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	120,000,000
101.0G Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis/Prioritas	240,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%	240,000,000
101.0H Penyusunan NSPK	61,300,000	4,050,000	0	0.00%	0	0.00%	61,300,000
PAD Peraturan Presiden	270,775,000	0	0	0.00%	0	0.00%	270,775,000
PAD.001 RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	0	0	0.00%	0	0.00%	270,775,000
101 Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	0	0	0.00%	0	0.00%	270,775,000
101.0A Penyusunan RPerpres tentang Rencana Pangan Nasional	270,775,000	0	0	0.00%	0	0.00%	270,775,000
QMA Data dan Informasi Publik	3,232,560,000	81,600,000	6,259,749	0.19%	2,051,059,749	0.63%	3,171,500,251
101 Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000	81,600,000	6,259,749	0.19%	2,051,059,749	0.63%	3,171,500,251
101.0A Layanan Data dan Informasi Pangan	3,232,560,000	81,600,000	6,259,749	0.19%	2,051,059,749	0.63%	3,171,500,251
101.0A Peningkatan Layanan Jaringan dan Sistem Informasi	2,837,423,000	81,600,000	4,412,749	0.16%	2,049,212,749	0.72%	2,833,010,251
101.0B Peningkatan Layanan Data dan Informasi	395,137,000	0	1,847,000	0.47%	1,847,000	0.47%	393,290,000
UAB Sistem Informasi Pemerintahan	221,999,000	77,000,000	0	0.00%	25,455,487	11.47%	196,543,513
101 Sistem Informasi Pangan dan Gizi	221,999,000	77,000,000	0	0.00%	25,455,487	11.47%	196,543,513
101.01 Sistem Informasi Pangan dan Gizi Terintegrasi	221,999,000	77,000,000	0	0.00%	25,455,487	11.47%	196,543,513
101.0A Pengelolaan Sistem Informasi Pangan	221,999,000	77,000,000	0	0.00%	25,455,487	11.47%	196,543,513